

# **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh**

*This research aims to examine the influence of Local Revenue and Capital Expenditure toward Regional economic growth in Aceh. This research population is 23 governments of district/city in Aceh and 20 of them taken as the samples form year 2006 to 2009. The research variables are Local Revenue and Capital expenditure as independent variables and Regional economic growth as dependent variable. The tests conducted by using Multiple-linear analysis, before hypothesis examined, the classical assumption test had been conducted. The result of this research prove that partially and simultaneously Local revenue and Capital Expenditure influence on the Regional economic growth in Aceh. Local revenue significantly and partially influences Regional economic growth and Capital Expenditure has not significant influences on the Regional economic growth in Aceh province. Thus, the governments of district/city in Aceh expected to use the this research in formulating the effective and efficient policy and strategy to stimulate the productive programs for local economic growth in Aceh province .*

**Keywords : Local Revenue, Capital Expenditure and Local Economic Growth**

**Wardhiah**  
Dosen Fakultas Ekonomi  
Universitas Malikussaleh  
Lhokseumawe

## PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pembangunan daerah juga berarti memampukan daerah untuk mengelola sumber daya ekonominya secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang, sejak tahun 1969 dengan giat melaksanakan pembangunan secara berencana dan bertahap, tanpa mengabaikan usaha pemerataan dan kestabilan. Pembangunan nasional mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang pada akhirnya memungkinkan terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat. Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perubahan yang *fluktuatif* dari tahun ke tahun.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun 1999-2007. Pada tahun 1998 menunjukkan penurunan Pertumbuhan Ekonomi yaitu -13,12%, hal ini disebabkan karena krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, yang berlanjut menjadi krisis multidimensi, sehingga membawa dampak pada Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, kemudian pada tahun-tahun berikutnya perekonomian nasional Indonesia mengalami pemulihan, meskipun jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya yang mengalami krisis serupa, proses pemulihan ekonomi di Indonesia sedikit lebih lambat.

Memasuki era otonomi daerah sejak tanggal 1 Januari 2001, pelaksanaan otonomi daerah mengacu pada UU nomor 32 tahun 2004 mengenai pembagian kewenangan dan fungsi (*power sharing*) antara pemerintah pusat dan daerah serta UU nomor 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah yaitu pengaturan pembagian sumber-sumber daya keuangan (*financial sharing*) antara pusat-daerah sebagai konsekuensi dari adanya pembagian kewenangan tersebut. Kondisi ini membawa implikasi pada pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah dalam berbagai bidang.

Salah satu fenomena paling menonjol dari kebijakan desentralisasi fiskal ini adalah justru ketergantungan daerah yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan, daerah kehilangan keleluasaan bertindak (*local discretion*) untuk mengambil keputusan-keputusan penting dan adanya campur tangan pemerintah pusat yang tinggi terhadap daerah. Realitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat didalam mengatur rumah tangga daerah, ini

ditunjukkan dengan adanya ketergantungan yang lebih besar kepada Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan Pendapatan Asli daerah dalam mendanai belanja (Senja dalam Mutiara, 2008).

Serupa dengan Ndadari dan Adi (2008:15) proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD. Kuncoro (2004:26) juga menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling besar 20%. Hal ini merupakan fenomena umum yang terjadi disemua negara terlepas dari sistem pemerintahannya yaitu hubungan keuangan antara pusat dan daerah (Senja dalam Haryo, 2008).

Sementara menurut Mangkusburo (1994), menyebutkan Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan murni yang dikelola dari daerah itu sendiri, potensi yang dimiliki berada didaerah yang digali oleh prioritas daerah dalam menjalankan kegiatan pembangunan dan belanja daerah atau usaha daerah yang memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintahan pusat. Dalam hal hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi, didukung oleh penelitian Saragih (2003) yang menyatakan bahwa peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi, daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan kenaikan PAD. Said Abdullah (2001) juga meneliti peran sektor publik terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia, dengan menggunakan Variabel PDRB sebagai variabel dependen dan variabel pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan sebagai variabel independen menemukan bahwa pengeluaran pembangunan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pengeluaran rutin berpengaruh positif namun sangat kecil.

Banyak kajian di atas telah menemukan kesimpulan dan pandangan yang tidak serupa antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain terhadap pengaruh Pendapatan Asli daerah dan Belanja Modal yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun penulis merasa ragu apakah kesimpulan kajian itu juga berlaku pada provinsi Aceh dengan 24 Kabupaten/Kota dengan tingkat Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal yang berbeda satu sama lain serta tingkat Pertumbuhan Ekonomi yang berbeda pula. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan tingkat PDRB baik secara harga berlaku maupun harga konstan.

Permasalahan yang bisa kita lihat di Aceh sebagai daerah yang kaya akan hasil kekayaan alam justru masih rentan dengan ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pusat. Dari pengamatan peneliti pada tabel 1 data yang ada memperlihatkan jumlah PAD masih sangat minim bila dibandingkan dengan Dana Perimbangan yang ditransfer dari pusat untuk setiap kabupaten/Kota di Aceh. Apabila hal tersebut

berlangsung terus menerus maka akan mengakibatkan dampak yang sangat fatal bagi kelangsungan suatu daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Seandainya pemberhentian transfer dana dari pusat dihentikan dan tidak dibekali dengan kemampuan daerah dalam memaksimalkan pendapatan asli daerahnya. Maka roda pemerintahan akan mengalami krisis keuangan yang pelik.

**Tabel 1. Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2008 (dalam jutaan rupiah)**

NO	DAERAH	PAD	Dana Perimbangan
1	Prop. Aceh	795,709	1,746,648
2	Kab. Aceh Barat	22,975	437,577
3	Kab. Aceh Besar	19,385	554,694
4	Kab. Aceh Selatan	15,000	466,435
5	Kab. Aceh Singkil	9,750	325,344
6	Kab. Aceh Tengah	15,011	459,510
7	Kab. Aceh	8,444	439,617
8	Kab. Aceh Timur	28,258	591,906
9	Kab. Aceh Utara	106,145	827,451
10	Kab. Bireuen	22,097	572,417
11	Kab. Aceh Pidie	14,594	561,244
12	Kab. Simeuleu	7,000	339,002
13	Kota Banda Aceh	45,000	484,672
14	Kota Sabang	9,120	305,272
15	Kota Langsa	21,744	342,988
16	Kota	25,210	401,562
17	Kab. Gayo Lues	6,027	378,641
18	Kab. Aceh Barat	15,000	357,303
19	Kab. Aceh Jaya	13,830	329,887
20	Kab. Nagan Raya	16,436	397,271
21	Kab. Aceh	20,644	422,580
22	Kab. Bener	6,332	336,658
23	Kab. Subulussalam	2,137	334,987
24	Kab. Pidie Jaya	2,035	241,479

Sumber: <http://www.djpk.depkeu.go.id/datadjpk>

Oleh karena itu telah menimbulkan tanda tanya bagi peneliti apakah pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di provinsi Aceh. Banyaknya daerah yang jumlah pendapatan asli daerah dengan belanja modal yang tidak seimbang bila dibandingkan dengan jumlah transfer dana dari pemerintah pusat artinya adanya gap antara realita yang menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah dan belanja modal maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur oleh tingkat PDRB suatu daerah. Oleh karena itu penelitian ini berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Aceh.

## KAJIAN PUSTAKA

### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2002:64) menyatakan Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berbicara mengenai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah secara keseluruhan.

Halim dan Nasir (2006:44) "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 157 UU No.32 Tahun 2004 dan pasal 6 UU No.33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

### Belanja Modal

Belanja modal sangat erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat (Halim, 2008) menyatakan bahwa kata investasi dapat diartikan bermacam-macam tergantung pada titik pandang atau konteks mengartikannya. Dalam bahasa ekonomi makro investasi dapat diartikan berbeda dengan bahasa ekonomi mikro, dan dapat berbeda pula dengan bahasa akuntansi. Dalam bahasa akuntansi pada konteks jenis belanja/biaya investasi dapat dimunculkan dari adanya perbedaan *antara revenue expenditure* dan *capital expenditure*. Investasi termasuk dalam pengertian belanja modal adalah *capital expenditure*, yang didefinisikan sebagai belanja/biaya pengeluaran yang memberi manfaat lebih dari satu tahun.

Pada pasal 53 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

Walaupun banyak perda penerimaan yang dikeluarkan tidak akan memberikan peningkatan pendapatan yang signifikan, hal ini menunjukkan indikasi adanya tingkat layanan publik yang masih

rendah. Pergeseran komposisi belanja ini, juga digunakan untuk pembangunan fasilitas modal yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan Wong (2004) menunjukkan pembangunan sektor industri tertentu (dalam hal ini sektor jasa dan retail) memberikan kontribusi positif terhadap kenaikan pajak. Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Mereka menemukan adanya korelasi yang kuat antara *share* (belanja) infrastruktur dengan tingkat desentralisasi. Strategi alokasi anggaran pembangunan ini pada gilirannya mampu mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi alat untuk mengurangi disparitas regional (Madjidji:1997).

### Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya. (Sadono Sukirno, 1994:10).

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga yang berlaku atau atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu daerah tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai harga dasar (Widodo, 2006:78).

Kuncoro (2004) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam suatu wilayah atau daerah pada suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Secara konsep, estimasi penghitungan nilai PDRB menggunakan pendekatan atas dasar harga berlaku (*at current price*), dan atas dasar harga konstan (*at constan price*). Baik PDRB

harga berlaku maupun harga konstan masing-masing mempunyai interpretasi data yang berbeda.

### Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi

Peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2003). Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya PEMDA lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak atau retribusi.

Oleh karena PAD harus berdampak pada pertumbuhan ekonomi maka daerah tidak akan berhasil bila tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berarti walaupun adanya kenaikan PAD. Bila yang terjadi sebaliknya, maka ada indikasi adanya eksploitasi PAD terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan produktifitas masyarakat itu sendiri.

Sidik (2002) menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dengan meningkatkan produktifitas masyarakat dalam mengembangkan ekonominya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi secara global baik di daerah maupun secara nasional.

Senada dengan Barata (2004) yang menyatakan bahwa daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan perkapita yang lebih baik. PAD berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah.

### Hubungan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi

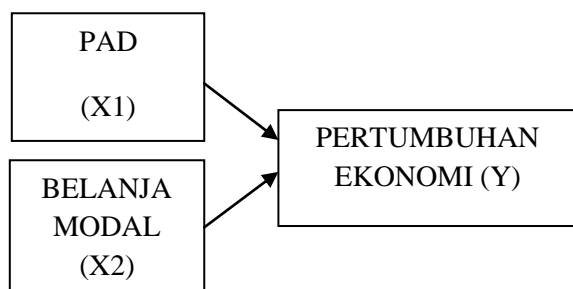
Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah dapat berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan peningkatan PDB/PDRB. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang sifatnya menaikan produktifitas (Ismerdekaningsih dan Rahayu, 2002).

Dalam mengalokasikan dan meningkatkan investasi di daerah tidak akan terlepas dari perencanaan belanja modal suatu daerah. Hal ini akan tergantung pada proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang

produktif di daerah. Sehingga sektor-sektor produktif tersebut akan memberikan manfaat bagi perputaran siklus perekonomian dengan multiplier efek bagi masyarakat yang akan meningkatkan pendapatan perkapita bagi siklus rumah tangga hingga akan meningkatkan pendapatan perkapita secara daerah.

**Kerangka Konseptual**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ismi Rizky Fitriyanti dan Suryo Protolo (2009) dengan judul penelitiannya Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi pada Kota/Kabupaten dan Provinsi di DIY yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Rasio Kemandirian, serta tidak ada pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Rasio Kemandirian terhadap pertumbuhan Ekonomi. Artinya adanya pengaruh antara pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hasil penelitian diatas menjadi referensi untuk mengembangkan kerangka konseptual dalam penelitian ini, sehingga kerangka konseptual penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

Berdasarkan Kerangka konseptual yang sudah dijelaskan sebelumnya maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- H1: Terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)
- H2: Terdapat pengaruh Belanja Modal (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)

**METODE PENELITIAN**

**Data penelitian**

Sampel penelitian ini adalah pemerintah daerah di Provinsi Aceh. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data realisasi APBD kabupaten dan kota di provinsi Aceh tahun 2006-2009. Sedangkan data pertumbuhan ekonomi, menggunakan data PDRB tahun 2006-2009.

Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus yang memakai semua anggota populasi sebagai

sampel dalam penelitian. Provinsi Aceh memiliki 18 Kabupaten dan 5 Kota, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 kabupaten/Kota sedangkan sisanya antara lain: Kota Subussalam, Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya tidak termasuk dalam penelitian ini. Karena tidak terdapat data yang memadai untuk tahun-tahun penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.

**Definisi Operasional Variabel**

**Tabel 2. Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator
Pendapatan Asli Daerah (X1) Referensi: Halim (2002)	Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.	PAD = PD+RD+ HPKD + Lain-lain PAD yang sah
Belanja Modal (X2) Referensi: PSAP 07	Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	BM= BMT+BMPM+BMG B+ BMJIJ+BMFL
Produk Domestik Regional Bruto (Y) Referensi: BPS Aceh	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi	Total PDRB ADHK=PDRB ADHK1 +PDRB ADHK2+ PDRB ADHK3+PDRB ADHK4 +PDRB ADHK5+ PDRB ADHK6+PDRB ADHK7 +PDRB ADHK8+ PDRB ADHK9 Total PDRB ADHK dalam data BPS Aceh 2006-2009

**Metode Analisis Data**

Alat analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda (*multiple linier regression*) dengan menggunakan software SPSS. Jadi pada penelitian ini jumlah observasi yang dimiliki adalah sebanyak N= 80 (20 kabupaten kota dan 4 jumlah tahun penelitian). Sehingga model analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e1...$$

Keterangan:

Y =Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Provinsi Aceh

b	=Konstanta
b <sub>1</sub> , b <sub>2</sub> ,	=Koefisien Regresi masing-masing Variabel
X <sub>1</sub>	=PAD
X <sub>2</sub>	=Belanja Modal
.e	=Error term

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Dari hasil pengumpulan data sekunder mengenai PAD, Belanja Modal, dan Produk Domestik Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2006 – 2009, maka statistik deskriptif yaitu mean dan standar deviasi penelitian dengan nilai rata-rata 1,1335E12 dengan standar deviasi yang lebih tinggi sebesar 7,82460E11, PAD memiliki nilai rata-rata 1,7060E10 dengan standar deviasinya 2,09248E10, Belanja Modal memiliki nilai rata-rata 9,7912E10 dengan standar deviasinya yang lebih rendah senilai 6,59865E10 Dengan jumlah data untuk masing-masing variabel yang diteliti adalah sebanyak 80.

### Uji Normalitas

Uji pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (X<sub>1</sub>), dan Belanja Modal (X<sub>2</sub>) terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) (Y). Jika data terdistribusi normal maka model yang digunakan dapat diterima. Uji normalitas data ditunjukkan pada tampilan Normal P-P Plot of *Regression Standardized Residual*. Pada tampilan Normal P-P Plot terlihat bahwa titik-titik yang ditampilkan mendekati garis atau sebaran data cenderung membentuk garis lurus dipersekitaran garis lurus. Hal ini mengindikasikan bahwa asumsi kenormalan tidak dilanggar (data berdistribusi normal). Maka model regresi layak dipakai untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi berdasarkan masukan variabel independennya.

### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas menganalisa kemungkinan adanya interdependensi antara variabel independen yang menyebabkan hasil OLS (*Ordinary Least Square*) memiliki varian dan kovarian yang besar, sehingga sulit dipakai sebagai alat estimasi, selain itu multikolinieritas menyebabkan interval estimasi cenderung lebar dan nilai statistik uji t akan kecil, sehingga menyebabkan variabel independen tidak signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini akan menggunakan nilai *tolerance* mempunyai angka mendekati dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) untuk melihat ada dan tidaknya.

Kriteria pengujian *tolerance* mempunyai angka mendekati 1 dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) kurang dari angka 5, maka model regresi tersebut diidentifikasi terbebas dari multikolinieritas. Hasil *output* menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dan nilai VIF antar variabel independen tidak mengandung multikolinieritas.

### Uji Heteroskedastisitas

Adanya heteroskedastisitas dalam pengolahan data pada penggunaan model OLS dapat mengakibatkan estimator metode kuadrat terkecil tidak mempunyai varian yang minimum dan perhitungan *standard error* tidak dapat dipercaya, sehingga uji F dan uji t tidak dapat lagi dipercaya. Oleh karena itu, pada pengujian menggunakan model OLS diusahakan data tidak mengandung masalah heteroskedastisitas dan hasil pengujiannya adalah membuktikan bahwa titik-titik *ploting* menyebar di atas maupun di bawah angka nol (0) pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi heteroskedastisitas atau tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas.

### Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil pengujian memperoleh nilai konstanta sebesar 1.121E-12, menunjukkan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah (X<sub>1</sub>), Belanja Modal (X<sub>2</sub>), dianggap tetap maka diperkirakan pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar 1.121E-12. Nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (b<sub>1</sub>) sebesar 0.874, dan ini bertanda positif (b<sub>1</sub> > 0). Ini menandakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB). Sementara nilai signifikansi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah adalah 0.000 (lebih kecil dari α = 5%). Ini membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB). Jadi dapat disimpulkan yang bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) pada Pemerintah. Kabupaten Dan Kota di Aceh.

Nilai koefisien regresi Belanja Modal (b<sub>2</sub>) sebesar -.038, dan ini bertanda negatif (b<sub>2</sub> < 0). Ini menandakan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB). Sementara nilai signifikansi untuk variabel Belanja Modal adalah 0.680 (lebih besar dari α = 5%). Ini membuktikan bahwa ada Belanja Modal tidak signifikan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB). Jadi dapat disimpulkan yang bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah. Kabupaten dan Kota di Propinsi Aceh.

Artinya semakin tinggi PAD suatu daerah akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, serta alokasi belanja modal yang efektif seharusnya dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih baik.

Dari hasil penelitian pengaruh PAD (X<sub>1</sub>), Belanja Modal (X<sub>2</sub>) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)(Y) maka hasil estimasi model dapat ditulis dalam persamaan dibawah ini:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e...$$

$$Y = 1,121E12 + 32,681 X_1 + (-0,450) X_2 + e$$

### Interprestasi Hasil Pengujian hipotesis

#### Pengujian Hipotesis H1 Pengaruh PAD(X1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) (Y)

Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung untuk Pendapatan Asli Daerah (X1) adalah sebesar 9.214 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari nilai signifikan 0.050, sementara nilai t tabelnya 1,645 dengan Nilai koefisien regresi PAD ( $b_1$ ) sebesar 0,874, dan ini bertanda positif ( $b_1 > 0$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi (PDRB) (Y) Kabupaten Kota di Aceh dan hipotesis pertama (H1) diterima.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Rokhmawati (2009) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil serupa juga ditemukan oleh Abrar (2010) yang melakukan penelitian pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan Ekonomi yang menyatakan bahwa PAD berkembang dengan tren yang positif setiap tahunnya, PDRB Provinsi Aceh juga bergerak ke arah yang positif, fungsi kuadrat kedua harus terus perlu diwaspadai posisinya di masa depan.

Karena PAD sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sebaiknya setiap kabupaten/kota di Aceh harus bisa meningkatkan PADnya dengan mengoptimalkan usaha-usaha yang produktif yang secara langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat juga mengefektifkan sumber pendapatan dari retribusi dan pajak daerah, memetakan titik galian C dan jumlah kontribusinya bagi daerah serta mengevaluasi kembali BUMD mana-mana saja yang mempunyai andil besar dalam pendapatan asli daerah.

#### Pengujian Hipotesis H2 Pengaruh Belanja Modal (X2) terhadap PDRB (Y)

Hasil penelitian nilai t hitung untuk Belanja Modal (X2) adalah sebesar -0.414 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0.680 lebih besar dari nilai signifikan 0.050, sementara nilai t tabelnya 1,645 dengan nilai koefisien regresi Belanja Modal ( $b_2$ ) sebesar 0,038, dan ini bertanda negatif ( $b_2 > 0$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal (X2) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB (Y) Kabupaten Kota di Aceh dan hipotesis kedua (H2) ditolak.

Abrar (2010) menyatakan bahwa hubungan belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan fungsi kuadrat yang perlu diwaspadai dimasa depan walaupun data tahun terakhir telah menunjukkan kondisi puncak, jika belanja tidak dimanfaatkan kepada kegiatan ekonomi produktif maka dikhawatirkan akan mengalami dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.

Senada dengan Anasmen (2009) yang meneliti tentang pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sumatra barat 2000-2006 hasil yang diperoleh adalah dalam penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB.

Dalam penelitian ini jumlah belanja modal di kabupaten/kota di Aceh bervariasi dari satu daerah dengan daerah yang lain dan tergolong dengan jumlah yang sangat besar. Namun hal tersebut tidak menjadikan alokasi belanja modal tersebut menjadi pemicu berkembangnya tren pertumbuhan ekonomi (PDRB) daerah Aceh itu sendiri. Ada beberapa faktor yang signifikan terjadi dalam aplikasi belanja modal, realitanya banyak alokasi belanja modal untuk gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah tidak mempunyai fungsi yang efektif bagi pertumbuhan ekonomi.

Contohnya pembangunan gedung untuk sarana umum yang menghabiskan dana dalam jumlah yang besar yang akhirnya menjadi bangunan tua tanpa ada fungsinya. Pembangunan jalan pedesaan yang tidak diimbangi oleh akses transportasi yang memadai, pembangunan gedung-gedung pemerintahan yang tidak efektif serta banyak lagi belanja modal lainnya yang tidak tepat sasaran dan tidak memberikan dampak apapun bagi pertumbuhan ekonomi di Aceh.

### Interprestasi Manajerial

Setelah melakukan analisis deskriptif terhadap data-data sekunder berupa data PAD, Belanja Modal dan Data Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB sehingga hasil penelitian dapat direkomendasikan beberapa implikasi kebijakan sesuai dengan prioritas yang dapat diberikan sebagai masukan. Berikut diuraikan beberapa saran alternatif yang bersifat strategis untuk Pemerintah Aceh umumnya dan Kabupaten Kota yang ada di Aceh khususnya, Oleh karena ada beberapa langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh khususnya Kabupaten Kota untuk meningkatkan PADnya diantaranya:

Intensifikasi dari pemungutan retribusi dan parkir daerah dan memetakan kembali sumber-sumber pendapatan dari retribusi daerah dan melakukan evaluasi kembali pelaksanaannya secara berkala sehingga setelah pemetaan diketahui banyak sumber retribusi dan parkir daerah namun hasil pendapatan selalu dalam keadaan minimal.

Evaluasi sumber-sumber PAD yang ada di daerah dan berasal dari BUMD, hasil evaluasi yang memberi gambaran secara umum tentang pelaksanaan dan operasional BUMD selama ini dan apakah dampaknya bagi keuangan pemerintah daerah secara positif atau sebaliknya semakin banyak subsidi yang diberikan kepada BUMD justru menjadikan daerah menghabiskan dana untuk BUMD tersebut.

Memaksimalkan usaha pemerintah untuk menghidupkan kembali usaha-usaha produktif dari

masyarakat guna meningkatkan pendapatan masyarakat yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis tentang Belanja Modal yang nominalnya memiliki tren yang meningkat dari tahun ketahun, hanya saja dibutuhkan beberapa langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh Umumnya dan pemerintah kabupaten Kota pada khususnya. Sehingga alokasi dana belanja modal ini akan efektif penggunaannya dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Ada beberapa hal yang harus menjadi catatan dan butuh evaluasi dari pemerintah Kabupaten Kota diantaranya:

Alokasi dana Belanja Modal yang harus lebih di seimbangkan antara pembangunan fisik dan infrastruktur lainnya dan efisiensi belanja modal. Berdasarkan pernyataan dari menteri dalam negeri sebaiknya alokasi dana belanja modal mencapai 30% dari total dana APBD daerah sehingga akan meningkatkan produktifitas. Persentase ini akan bisa tercapai bila ada efisiensi untuk mengurangi anggaran untuk kunjungan anggota dewan ke luar daerah.

Adanya evaluasi dan pengawasan dari pemerintah pada setiap program pemerintah, dari segi belanja modal yang tidak terdistribusi dengan rata untuk masing-masing daerah. Belum lagi banyak mark up dari segi dana proyek, kemudian proyek fiktif dan penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada capaian target dari belanja modal itu sendiri.

Adanya *planning* atau perencanaan yang matang terhadap belanja modal yang akan dianggarkan sehingga tidak hanya ada pada fokus pembangunan jalan dan jembatan atau bangunan fisik yang akhirnya tidak berfungsi. Belanja modal yang diharapkan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan stabil, namun karena salah dalam hal perencanaan dan pemetaan awal akan menjadikan dana pembangunan yang sia-sia. Itu banyak terjadi di kabupaten kota yang ada di Aceh.

Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dengan PDRB secara umum telah menggambarkan kondisi yang sangat baik karena trennya terus naik dari tahun ketahun. Untuk itu dibutuhkan beberapa langkah strategis yang harus digunakan dalam mempertahankan hal tersebut diantaranya:

Menjaga pengeluaran pemerintah lebih dominan peruntukannya terhadap belanja modal yang sifatnya produktif yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Melakukan pemetaan kembali terhadap usaha-usaha atau sektor-sektor yang memberikan kontribusi yang lebih terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga lebih di optimalkan.

Melakukan pengawasan terhadap *stake holder* yang menerima dampak baik secara langsung maupun tidak langsung dari Belanja Modal. Apakah dampak tersebut memberikan efek peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi ataukah hanya menjadi bangunan yang tidak terpakai.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) yang berarti semakin tinggi PAD yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota maka akan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. artinya tingkat alokasi belanja modal tidak secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan Ekonomi yang diukur dengan tingkat PDRB.

Terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD, Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). Ada hubungan yang positif antara masing-masing variabel. Artinya semakin tinggi tingkat penerimaan PAD akan meningkatkan Alokasi belanja modal juga akan tinggi yang akan secara langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

### Keterbatasan

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya meliputi Kota, Kabupaten dan Propinsi Aceh. Variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang diteliti hanya PAD dan Belanja modal serta pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder, sehingga tingkat validitas data sangat ditentukan oleh sumber data berupa dokumentasi laporan realisasi APBD dan PDRB yang ada di BPS. Peneliti hanya bisa melakukan secara terbatas dengan melakukan *cross chek* berupa observasi pada Kabupaten kota di Aceh.

### Saran

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah maka pemerintah harus bisa mengoptimalkan dari segi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Daerah harus bisa terus menggali potensi daerah dan secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Guna meminimalkan tingkat ketergantungan terhadap pusat. Guna meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dengan optimalnya usaha-usaha produktif yang dapat menjadikan nilai barang dan jasa akhir tinggi.

Bagi pemerintah dan juga stake holders yang berhubungan dalam pengalokasian anggaran sebaiknya dapat mengalokasikan anggaran belanja modal tidak hanya pada bangunan fisik atau infrastruktur yang sifatnya baku, melainkan dapat mengalokasikan belanja modal pada sektor yang sifatnya produktif dan dapat berkembang dari tahun ketahun guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperlebar interval data time seriesnya dan menambah sampel yang digunakan agar hasilnya



lebih representatif terhadap populasi yang dipilih serta waktu penelitian hendaknya lebih panjang sehingga kelihatan kecenderungannya

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel-variabel independen lain secara lebih terperinci dari segi Pendapatan Asli

Daerah maupun dari segi non keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi seperti inflasi sehingga hasil penelitian lebih akurat.

## REFERENSI

- Abrar. Muhammad .(2010). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis
- Adi. (2006). “ Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah”. Simposium Nasional Akuntansi 9.Padang.
- Anasmen. (2009). “Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat 2000-2006. Tesis S-2, Fakultas ekonomi Program studi perencanaan dan kebijakan publik kekhususan ekonomi keuangan negara dan daerah Depok.(tidak dipublikasi).
- Anita. Rokhmawati. (2009). “ Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Propinsi Jawa Timur”.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, (2004 – 2010), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh
- BAPPENAS (2003). Peta Kemampuan Keuangan Propinsi dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah. Direktorat Jenderal Pengembangan Otonomi Daerah. Jakarta.
- Brata. Aloysius Gunadi. (2004). “Komposisi Penerimaan Sektor Publik Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional”. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. (2006). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Halim, Abdul, (2002). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta; Salemba Empat.
- Halim, Abdul, (2004). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Revisi). Jakarta; Salemba Empat.
- Ismi Rizky Fitriyanti dan Suryo Protolo. (2009). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kota, Kabupaten dan Propinsi Di DIY)
- Kuncoro, Mudrajat (2004). Otonomi Dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. (2002). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Priyo Hari Adi, Laras Wulan Ndadari, (2008), Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Transfer Pemerintah Pusat. The 2nd National Conference UKWMS Surabaya, 6 September 2008.
- Republik Indonesia 2000, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia .2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia .2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Saragih, Juli Panglima. (2003). Desentralisasi fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Penerbit Ghalia Indonesia Jakarta.
- Senja, (2008).”Analisis Pengaruh *Fiscal Stress* dan *Flypaper Effect* Pada Dana terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Pada Kabupateb Dan Propinsi di DIY”, Skripsi Mahasiswa universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sidik, Mahcfud, B. Raksasa Mahi, Robert Simanjuntak, & Bambang Brodjonegoro. (2002). Dana Alokasi Umum-Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Edisi 8) Bandung:Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (1994). Pengantar Teori Makro Ekonomi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sukirno,Sadono, (2004), Pengantar dan Teori Makro ekonomi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Widodo, Tri. (2006). Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah). Yogyakarta: UPP STIM YKPN